



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUWUH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 105886

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 630.000.000

1. Tanah Seluas 15.94 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah Seluas 84.5 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3.68 m2/120 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah Seluas 15.43 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 36.28 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 128.000.000

1. MOTOR, HONDA R2/BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA R4/AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 58.183.457

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 820.683.457

III. HUTANG

Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

820.683.457

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.